

Judul : Jokowi: Biaya Haji 2023 Belum Final
Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 1 & 10



MUHAMMAD KHALIL/ANTARA

*PETUGAS biro perjalanan haji dan umrah menunjukkan buku panduan ibadah di Kantor Travel Haji dan Umrah Tanur Muthmainnah Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (10/1/2023).**

Jokowi : Biaya Haji 2023 Belum Final

JAKARTA, (PR). -

Presiden Joko Widodo menegaskan, biaya perjalanan haji tahun 2023 masih dalam pengkajian dan belum final. Pemerintah saat ini baru sebatas mengusulkan besaran biaya perjalanan ibadah haji. Penetapan biaya haji nantinya akan dibahas bersama dengan DPR.

"Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi," kata Jokowi usai meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 H/2023

M sebesar Rp 69.193.733 per orang. Ongkos itu lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp 39.886.009 per orang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70% dari rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diusulkan Rp 98.893.909 per orang. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun 2023 meningkat Rp 514.888 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan signifikan dalam

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Jokowi : Biaya

(Sambungan dari hal. 1 kol. 3)

komposisi BPHH.

Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhl Imansyah mengatakan, usulan kenaikan BPHH 1444 H/2023 M karena pertimbangan mencegah tergerusnya nilai manfaat dari jemaah haji mendatang. Ada kekhawatiran dana nilai manfaat akan habis sebelum tahun 2027. Jika tidak ada kenaikan biaya penyelenggaraan haji yang dibebankan kepada jemaah.

Fadhl mengatakan, setiap tahunnya, biaya haji naik akibat inflasi dan kurs. Pada tahun 2010, biaya haji yang di-

butuhkan totalnya Rp 34,5 juta. Perinciannya, sebesar Rp 30 juta dibebankan pada setiap jemaah dan Rp 4,45 juta diambil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.

"Dengan demikian, nilai manfaatnya hanya 13%, se-tunggu. Ada kekhawatiran dana nilai manfaat akan habis sebelum tahun 2027. Jika tidak ada kenaikan biaya penyelenggaraan haji yang dibebankan kepada jemaah adalah 8%," katanya.

Ia mengklaim, pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan nilai manfaat dari BPKH selama periode 2010-2019. Tujuannya supaya biaya haji yang ditanggung

jemaah tidak naik secara drastis.

"Tahun 2019, rasio antara Biph dan nilai manfaat sudah mencapai angka seimbang 50% banding 50%," katanya dalam diskusi tentang usulan kenaikan biaya haji di Hotel Borobudur, Jakarta Selasa (24/1/2023).

Tergerus

Pada tahun 2022, kata Fadhl, ada kenaikan biaya layanan haji yang signifikan dan tergolong tidak normal. Total biaya haji naik dari kisaran Rp 70 juta menjadi Rp 90 juta.

Pada saat itu, kenaikan biaya tidak dibebankan ke jemaah.

"Jadi penggunaan nilai manfaatnya yang naik, dua

kali lipat dari kondisi normal. Ini masalahnya," ujarnya.

Menurut dia, pokok persoalannya adalah sumber penggunaan dana nilai manfaat tersebut tidak hanya diambil dari tahun 2023 saja, tetapi juga dari jemaah haji lainnya yang masih dalam antrian. Jika tahun 2023 biaya yang dibebankan ke jemaah tidak naik dan penggunaan nilai manfaat masih besar seperti tahun 2022, maka huk nilai manfaat dari jemaah haji pada tahun-tahun mendatang akan tergerus.

"Kalau penggunaan nilai manfaatnya terus besar seperti tahun lalu, jemaah haji yang berangkat tahun-tahun mendatang, nilai manfaatnya

diambil oleh jemaah yang berangkat. Justru itu yang tidak adil," kata Fadhl.

Ia menambahkan, jika penggunaan nilai manfaat masih sama seperti tahun 2022, nilai tersebut sudah habis sebelum 2027. "Yang kita usulkan 70% biaya dari jemaah haji yang berangkat sekarang, dan 30% dari nilai manfaat yang dikelola BPKH," ujarnya.

Fadhl mengatakan, saat ini masih ada diskusi lanjutan bersama DPR RI terkait berapa persen yang harus dibayar jemaah dan berapa persen yang harus dibebankan pada nilai manfaat. Namun, ia beranggapan bila penggunaan nilai manfaat bisa berada di

kisaran 30%.

"Kalau penggunaan nilai manfaat lebih dari 30%, maka akan menggerus nilai manfaat dari jemaah haji yang akan berangkat tahun-tahun selanjutnya. Apakah itu yang kita inginkan?" kata Fadhl.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal kenaikan biaya haji di tengah kebijakan pemerintah Arab Saudi yang justru menurunkan biaya. Ia menegaskan, kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu hanya untuk jemaah dalam negeri saja.

"Jadi tidak berpengaruh (penurunan biaya haji di Arab Saudi dengan kenaikan biaya di Indonesia)," katanya.

Di tempat sama, Dirjen Pe-

nyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, diperlukan rasionalisasi dari biaya dan nilai manfaat yang sangat tinggi pada saat ini. Pemerintah dituntut untuk bisa menawarkan pembiayaan yang normal.

Ia menambahkan, masih akan ada rapat lanjutan bersama Komisi VIII DPR RI mengenai biaya haji. Selain itu, Kemenag juga telah bertemu *stakeholder* yang akan melayani jemaah haji.

"Kami akan berdiskusi bagaimana rasionalisasi haji bisa dilakukan agar kenaikan biaya haji seperti yang terjadi pada tahun 2022 bisa diantisipasi lebih awal," katanya. (Muhammad Ashari)***